

Strategi Pengembangan Model Pembiayaan Pendidikan Inklusi : Solusi Dukungan Finansial Berkelanjutan

**Wahyudi Nafarin¹, Grace Eljohn², Yunita Sari³, Usfandi Haryaka⁴,
Widyatmike Gede Mulawarmana⁵**

Universitas Mulawarman, Indonesia

wahyudinafarin123@gmail.com¹, gracesmd158@gmail.com²,
yunitasariA1E313083@gmail.com³, usfandi.haryaka@fkip.unmul.ac.id⁴,
widyatmike@fkip.unmul.ac.id⁵

Submitted: 20th February 2025 | **Edited:** 28th April 2025 | **Issued:** 01st May 2025

Cited on: Nafarin, W., Eljohn, G., Sari, Y., Haryaka, U., & Mulawarmana, W. G. (2025). Strategi Pengembangan Model Pembiayaan Pendidikan Inklusi: Solusi Dukungan Finansial Berkelanjutan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 717-729.

ABSTRACT

Inclusive education is increasingly recognized as a fundamental aspect of equitable and quality education for all. However, its implementation often faces financial challenges, particularly in ensuring sufficient resources to accommodate learners with diverse needs, including those with disabilities. The urgency of this research lies in the growing demand for inclusive educational practices and the lack of sustainable financial models to support them effectively. This study aims to develop a sustainable funding model strategy for inclusive education by exploring innovative financial solutions such as public-private partnerships, community fundraising initiatives, and more efficient budget allocation mechanisms. Utilizing qualitative methods including case studies, policy analysis, and in-depth interviews with policymakers, educators, and financial experts this research reveals that inclusive education funding can be significantly improved through collaborative and diversified funding sources. The findings show that successful implementation often involves multi-stakeholder engagement, transparency in fund management, and adaptive financial planning. The implications of this research are far-reaching. It provides practical and scalable recommendations for policymakers, educational institutions, and non-governmental organizations to design and implement funding strategies that are both sustainable and equitable. These strategies not only improve access to inclusive education but also strengthen the overall quality and resilience of education systems, particularly in under-resourced regions.

Keywords: Inclusive Education, Education Funding, Financial Support, Development Strategy, Budget Allocation

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia secara manusiawi yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman (Dewantara, 2023). Di samping itu pengertian pendidikan menurut Undang-undang

No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan inklusi, sebagai paradigma pendidikan yang berupaya mengakomodasi keberagaman peserta didik, telah menjadi fokus perhatian global. Konsep ini menekankan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus (Pristiwanti, et al., 2022). Pendidikan inklusi bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang partisipasi penuh dan pencapaian hasil belajar yang optimal. Di Indonesia, komitmen terhadap pendidikan inklusi tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi, seperti Permendikbudristek No.48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Namun demikian implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah masalah pembiayaan. Mel Ainscow (2007) dalam Siregar (2020) menyatakan bahwa pendidikan inklusif memerlukan pendekatan yang lebih holistik terhadap kebijakan dan praktik pendidikan, yang termasuk pembiayaan yang sesuai untuk mendukung kebutuhan siswa dengan disabilitas. Pembiayaan pendidikan inklusi membutuhkan pendekatan yang berbeda dari pembiayaan pendidikan yang reguler. Peserta Didik Penyandang Disabilitas sudah pasti membutuhkan layanan dan fasilitas khusus, seperti tenaga pendidik khusus, alat bantu belajar khusus, dan modifikasi kurikulum. Tentunya kebutuhan ini memerlukan anggaran yang lebih besar daripada peserta didik reguler lainnya (Purba, et al., 2023).

Sangat disayangkan alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih terbatas dan belum merata. Mekanisme alokasi anggaran yang ada juga belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan, sehingga tidak semua peserta didik penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang sesuai (Fihana, 2024). Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya strategi pengembangan model pembiayaan pendidikan inklusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Model pembiayaan yang ada saat ini perlu dievaluasi dan diperbaiki agar mampu memenuhi kebutuhan beragam peserta didik dan menjamin keberlangsungan program pendidikan inklusi (Almarhalah, 2023).

LANDASAN TEORI

Permendiknas No 70 tahun 2009 menyebutkan pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pelaksanaan pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif (Sitanggang, et al., 2025). Bagi mereka, anak-anak yang normal, pendidikan inklusif itu juga bisa menempa mental, ego, persepsi dan cara pandang terhadap anak-anak berkebutuhan khusus (Munajah, et al., 2021). Model ini juga membangun jiwa humanisme anak-anak normal, mereka adalah ciptaan Tuhan yang juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan sama dengan anak-anak normal.

Untuk menunjang proses kegiatan belajar bagi anak-anak inklusi, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Anak-anak dengan kebutuhan khusus memerlukan berbagai layanan tambahan, seperti pendampingan khusus, alat bantu belajar, dan fasilitas fisik yang ramah disabilitas (Utama, 2021). Semua elemen ini tidak hanya membutuhkan komitmen kebijakan, tetapi juga dukungan finansial yang konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, serta lembaga swasta. Tanpa dukungan pembiayaan yang tepat, upaya menciptakan lingkungan belajar yang ramah inklusi akan sulit terwujud secara optimal (Wardhani & Andika, 2021).

Secara umum, pembiayaan pendidikan mencakup seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, serta penggunaan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan (Hakeu, et al., 2020). Pembiayaan ini harus dirancang secara efektif dan efisien agar mampu mendukung keberlanjutan operasional lembaga pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan peserta didik (Masyhura, 2023). Dalam konteks pendidikan inklusi, perencanaan dan pengelolaan pembiayaan menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan ragam kebutuhan individu siswa yang berbeda-beda, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional (Rahayuningtias, 2021).

Pembiayaan pendidikan inklusi memegang peran strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi semua peserta didik, termasuk mereka

yang memiliki hambatan dalam belajar (Rohmawati, et al., 2023). Dengan adanya skema pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan, diharapkan setiap anak mendapatkan akses yang setara terhadap layanan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi (Safitri & Adiyono, 2023). Hal ini sejalan dengan semangat pendidikan untuk semua (Education for All), di mana pendidikan tidak boleh meminggirkan kelompok manapun, terutama kelompok rentan (Sapitri & Adiyono, 2023). Oleh karena itu, pengembangan model pembiayaan yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan inklusi menjadi suatu keniscayaan dalam membangun sistem pendidikan yang benar-benar inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sugiyono dalam Saraya, et al. (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat menyeluruh dan mendalam, dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara komprehensif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam dan komprehensif terkait strategi pengembangan model pembiayaan pendidikan inklusi di SDN 008 Samarinda Ulu. Studi kasus digunakan untuk memahami konteks spesifik dan kompleksitas permasalahan yang ada di lokasi penelitian

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi Penelitian : SDN 008 Samarinda Ulu

Subjek Penelitian :

1. Kepala Sekolah SDN 008 Samarinda Ulu.
2. Guru Pendidikan Inklusi di SDN 008 Samarinda Ulu.
3. Orang tua siswa dengan kebutuhan khusus di SDN 008 Samarinda Ulu.
4. Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
5. Pihak-pihak terkait lainnya yang relevan dengan pembiayaan pendidikan inklusi.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi mendalam terkait :

1. Model pembiayaan pendidikan inklusi yang saat ini diterapkan.

2. Tantangan dan hambatan dalam pembiayaan pendidikan inklusi.
3. Strategi yang telah dan dapat dilakukan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan.
4. Harapan dan kebutuhan seluruh pihak terkait.

Studi Literatur

Mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait pendidikan inklusi dan pembiayaannya.

Tujuan studi literatur adalah untuk:

1. Memperoleh landasan teoritis yang kuat.
2. Mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dalam pembiayaan pendidikan inklusi.

HASIL PENELITIAN

Pengembangan Model Pembiayaan Pendidikan Inklusi terus di kaji dan di evaluasi sebaik dan efektif mungkin, Pengembangan model pembiayaan untuk pendidikan inklusi membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan fleksibel, dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemetaan sumber pembiayaan yang lebih efektif, serta penerapan model pembiayaan berbasis kinerja dan berbasis kebutuhan, dapat mempercepat implementasi pendidikan inklusi yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, kesadaran dan pelatihan stakeholder terkait menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas model pembiayaan ini.

Analisis Model Pembiayaan Pendidikan yang Berlaku

Sumber- sumber Pembiayaan Pendidikan Inklusi

Pembiayaan dari Pemerintah

1. Pemerintah Pusat
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan
 - b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - c. Program Indonesia Pintar (PIP)
 - d. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BOP PK)
 - e. Dana Bantuan Pemerintah untuk Sarana Prasarana Pendidikan
2. Pemerintah Daerah

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pendidikan
 - c. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
 - d. Dana Hibah Khusus Pendidikan Inklusi Tingkat Daerah
3. Pembiayaan Non-Pemerintah
- a. Sektor Swasta
 - 1) Program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN dan swasta
 - 2) Kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan industri
 - 3) Yayasan-yayasan perusahaan (seperti Tanoto Foundation, Djarum Foundation)
 - 4) Program adopsi sekolah oleh perusahaan
 - b. Organisasi Non-Pemerintah
 - 1) Gerakan Sekolah Menyenangkan
 - 2) Yayasan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
 - 3) Wahana Visi Indonesia
 - 4) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) di berbagai universitas
 - c. Masyarakat dan Komunitas
 - 1) Dana Komite Sekolah
 - 2) Partisipasi orangtua siswa
 - 3) Paguyuban orang tua dan masyarakat
 - 4) Platform crowdfunding Indonesia (seperti Kitabisa.com)
 - d. Model Pembiayaan Inovatif
 - 1) Pendanaan Berkelanjutan
 - a) Pembentukan unit usaha/bisnis sekolah
 - b) Koperasi sekolah
 - c) Hasil karya siswa berkebutuhan khusus yang dipasarkan
 - d) Pelatihan keterampilan untuk masyarakat sebagai sumber pendapatan

Strategi Pengembangan Model Pembiayaan yang Berkelanjutan

Berikut adalah strategi pengembangan model pembiayaan berkelanjutan untuk pendidikan inklusi di Indonesia:

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pembiayaan
 - a. Pengembangan kebijakan pembiayaan khusus pendidikan inklusi di tingkat

- pusat dan daerah
- b. Penyusunan petunjuk teknis alokasi dana BOS untuk pendidikan inklusi
 - c. Penguatan sistem insentif bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi
 - d. Pengembangan formula pembiayaan berbasis kebutuhan peserta didik (weighted student funding)
- 2) Diversifikasi Sumber Pembiayaan
- a. Pengembangan kerjasama multi-stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat)
 - b. Optimalisasi dana CSR perusahaan untuk pendidikan inklusi
 - c. Pembentukan konsorsium pendanaan pendidikan inklusi
 - d. Pemberdayaan peran komite sekolah dalam penggalangan dana
- 3) Penguatan Kapasitas Sekolah dalam Pengelolaan Keuangan
- a. Pelatihan manajemen keuangan bagi kepala sekolah dan bendahara sekolah inklusi
 - b. Pendampingan penyusunan rencana anggaran pendidikan inklusi
 - c. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penggunaan dana
 - d. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana
4. Pengembangan Unit Usaha Sekolah
- a. Pembentukan dan penguatan koperasi sekolah
 - b. Pengembangan produk keterampilan siswa berkebutuhan khusus yang bernilai ekonomi
 - c. Penyelenggaraan jasa pelatihan dan konsultasi pendidikan inklusi
 - d. Pembentukan partnership dengan industri untuk program magang dan pemasaran produk
5. Penerapan Model Pembiayaan Inovatif
- a. Implementasi sistem voucher pendidikan khusus
 - b. Pengembangan dana abadi (endowment fund) pendidikan inklusi
 - c. Penerapan skema pembiayaan berbasis kinerja (performance-based funding)
 - d. Pemanfaatan platform crowdfunding untuk proyek pendidikan inklusi
6. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana
- a. Penerapan skala prioritas dalam penggunaan anggaran
 - b. Berbagi sumber daya (resource sharing) antar sekolah penyelenggara

pendidikan inklusi

- c. Pemanfaatan teknologi untuk efisiensi biaya operasional
 - d. Pengembangan kebijakan satu data pembiayaan pendidikan inklusi
7. Penguatan Peran Pemerintah Daerah
- a. Pengalokasian dana APBD khusus untuk pendidikan inklusi
 - b. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pembiayaan pendidikan inklusi
 - c. Pembentukan dana dekonsentrasi pendidikan inklusi di daerah
 - d. Pengembangan kebijakan afirmatif pembiayaan pendidikan inklusi di daerah

3T

Tantangan dan Hambatan dalam Pembiayaan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus (ABK), mendapatkan kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang sama, dengan perlakuan yang setara (Saraya, et al., 2023). Namun, meskipun ada kemajuan dalam pembiayaan pendidikan inklusi, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar pendidikan inklusi dapat terlaksana secara optimal. Beberapa tantangan dan hambatan utama dalam pembiayaan pendidikan inklusi di Indonesia adalah sebagai berikut (Suparmin & Adiyono, 2023):

1. Keterbatasan Anggaran : Salah satu tantangan utama dalam pembiayaan pendidikan inklusi adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Meskipun pemerintah sudah mengalokasikan dana melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran ini sering kali tidak mencakup semua kebutuhan yang ada, seperti penyediaan alat bantu, pembangunan infrastruktur yang ramah difabel, dan pelatihan guru. Dalam banyak kasus, sekolah-sekolah inklusi harus mengandalkan dana terbatas untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan disabilitas. Keterbatasan anggaran yang ada membatasi sekolah untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus) yang beragam sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Hambatan terkait: Anggaran untuk pendidikan inklusi sering kali diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan secara umum, mengakibatkan pendidikan inklusi sering kali terabaikan. Banyak sekolah di daerah terpencil atau kurang berkembang tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan pendidikan

inklusi secara maksimal.

2. Ketimpangan Pembiayaan Antar Daerah : Ketimpangan pembiayaan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah-sekolah yang berada di daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal, sering kali menyebabkan disparitas dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Sekolah-sekolah di kota besar biasanya memiliki lebih banyak akses terhadap fasilitas, pelatihan, dan sumber daya lainnya dibandingkan dengan sekolah di daerah terpencil yang sering kali kekurangan dana untuk pendidikan inklusi.

Hambatan terkait: Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketidakmerataan dalam distribusi dana pendidikan membuat implementasi pendidikan inklusi tidak dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah.

3. Kurangnya Infrastruktur yang Mendukung : Salah satu hambatan besar dalam pendidikan inklusi adalah kurangnya infrastruktur yang mendukung bagi siswa dengan disabilitas. Kondisi fisik sekolah yang tidak mendukung dapat menghambat proses belajar mengajar anak berkebutuhan khusus. Fasilitas yang ramah difabel, seperti jalur kursi roda, ruang kelas yang dapat diakses dengan mudah, atau alat bantu pembelajaran seperti buku braille atau perangkat pembaca layar, masih sangat terbatas di banyak sekolah. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat aksesibilitas bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Hambatan terkait: Banyak sekolah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan renovasi bangunan atau menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk siswa dengan disabilitas. Proses pembangunan atau renovasi yang membutuhkan biaya tinggi dan waktu lama sering kali terhambat oleh keterbatasan dana.

- 4) Kurangnya Guru Terlatih untuk Pendidikan Inklusi: Pendidikan inklusi memerlukan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola keberagaman siswa, termasuk yang memiliki disabilitas. Guru harus memahami karakteristik siswa dengan kebutuhan khusus dan mampu merancang serta menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Namun, jumlah guru yang terlatih dan memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusi masih sangat terbatas. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menangani

siswa dengan kebutuhan khusus di dalam kelas reguler.

Hambatan terkait: Banyak sekolah kekurangan guru dengan pelatihan khusus dalam pendidikan inklusi. Kurangnya program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Ketidaksiapan guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa.

- 5) Keterbatasan Alat Bantu dan Sumber Daya Pendidikan: Pendidikan inklusi membutuhkan alat bantu pembelajaran yang memadai, seperti perangkat braille, alat bantu pendengaran, perangkat teknologi assistive, atau perangkat lunak pembelajaran yang dapat diakses oleh anak dengan disabilitas. Namun, banyak sekolah yang tidak memiliki dana untuk membeli alat bantu ini, dan hal ini membatasi kemampuan mereka untuk memberikan pendidikan yang setara bagi siswa dengan disabilitas.

Hambatan terkait: Alat bantu pembelajaran yang diperlukan untuk mendukung siswa dengan disabilitas sering kali mahal, dan sekolah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ini dengan dana terbatas. Tidak semua sekolah memiliki akses ke teknologi atau perangkat lunak yang bisa mendukung pembelajaran inklusi.

- 6) Kurangnya Kesadaran dan Dukungan dari Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga, menjadi salah satu tantangan besar dalam menghilangkan stigma (cap buruk) dan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus.

Hambatan terkait: Stigma dan stereotip terhadap anak-anak dengan disabilitas sering kali menghalangi penerimaan mereka di sekolah-sekolah inklusi. Masyarakat dan orang tua mungkin tidak sepenuhnya mendukung program pendidikan inklusi karena kurangnya pemahaman tentang manfaatnya.

- 7) Tantangan dalam Kurikulum dan Metode Pembelajaran: Pendidikan inklusi memerlukan kurikulum yang fleksibel dan metode pembelajaran yang dapat mengakomodasi berbagai jenis kebutuhan belajar. Namun, kurikulum yang ada saat ini sering kali tidak dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman kebutuhan siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Hal ini membuat pembelajaran menjadi kurang efektif bagi siswa dengan disabilitas.

Hambatan terkait: Kurikulum yang bersifat umum sering kali tidak cukup

fleksibel untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa dengan disabilitas. Metode pengajaran di kelas biasa mungkin tidak selalu cocok untuk siswa dengan kebutuhan khusus, yang memerlukan pendekatan yang lebih individual.

- 8) Keterbatasan Akses dan Partisipasi dalam Program Pemerintah: Meskipun ada berbagai program pemerintah yang mendukung pendidikan inklusi, seperti beasiswa dan bantuan operasional sekolah, tidak semua sekolah atau siswa dengan disabilitas mendapatkan akses yang sama. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi atau prosedur yang rumit untuk mengakses dana atau bantuan.

Hambatan terkait: Tidak semua sekolah mengetahui bagaimana mengakses dana atau program pemerintah untuk pendidikan inklusi. Beberapa siswa dengan disabilitas mungkin tidak memiliki akses ke bantuan atau beasiswa yang dapat mendukung pendidikan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Model Pembiayaan Pendidikan inklusi membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan fleksibel, dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemetaan sumber pembiayaan yang lebih efektif, serta penerapan model pembiayaan berbasis kinerja dan berbasis kebutuhan, dapat mempercepat implementasi pendidikan inklusi yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, kesadaran dan pelatihan stakeholder terkait menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas model pembiayaan ini. Serta dengan peningkatan hal lain terkait diantaranya:

1. Keterbatasan Dana dan Infrastruktur

Pembiayaan pendidikan inklusi seringkali terhambat oleh keterbatasan dana yang dialokasikan oleh pemerintah, serta terbatasnya infrastruktur yang ramah disabilitas di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang lebih besar dan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan inklusi di berbagai daerah sangat diperlukan.

2. Kesadaran dan Dukungan Masyarakat:

Keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi

juga pada kesadaran masyarakat. Dukungan masyarakat yang lebih luas, termasuk orang tua, komunitas, dan sektor swasta, sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung siswa berkebutuhan khusus.

3. Peran Guru dan Pelatihan Profesional:

Pendidikan inklusi memerlukan guru yang memiliki kompetensi khusus untuk mengelola keberagaman siswa. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran bagi siswa dengan disabilitas.

4. Model Pembiayaan yang Berkelanjutan:

Solusi finansial berkelanjutan untuk pendidikan inklusi dapat dicapai melalui berbagai pendekatan, seperti kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta pemberian insentif dan beasiswa untuk siswa dan sekolah inklusi. Pemerintah perlu memastikan adanya alokasi anggaran khusus dan penyediaan dana yang cukup untuk program pendidikan inklusi.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan kerjasama antara semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Pembiayaan yang tepat dan kebijakan yang inklusif akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan merata bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Almarhalah, A. (2023). Menjaga Akses Pendidikan yang Adil: Tantangan dan Solusi dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2).
- Dewantara, K. H. (2023). *Definisi Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara*. Kemdikbud. <https://kemdikbud.my.id/definisi-pendidikan-menurut-ki-hadjar-dewantara.html>
- Fihana, M. Y. O. (2024). Strategi dan Konsep Teoritis dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1), 189–208.
- Hakeu, F., Djahuno, R., & Zakarina, U. (2020). Transformasi Pembelajaran dalam Pengembangan Model Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Journal of Elementary Educational Research*, 3(2).
- Masyhura, S. (2023). Model Pembiayaan Pendidikan di Sekolah: Menuju Keberlanjutan dan Inklusivitas Pendidikan. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183–1190.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911–7915.

<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9498>.

- Purba, A. W. A., Situmeang, N. T. F. N., Fitriani, D., Febry, K., Sihombing, F., & Siregar, Y. R. (2023). Problematika Pembiayaan Pendidikan di Sekolah. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 4(1), 324–334.
- Rahayuningtias, Z. D. (2021). Penerapan Model Pengembangan Kurikulum PAI SMA Negeri 1 Batu Engau. *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 72–80.
- Rohmawati, O., Poniya, P., & Adiyono, A. (2023). Implementasi Supervisi Pendidikan Sebagai Sarana Peningkatan Kinerja Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1(3), 108–119.
- Safitri, I. N., & Adiyono, A. (2023). Model Pendidikan Karakter Interaktif (Transformasi Disiplin Siswa Melalui Kreativitas Pembelajaran). *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(6), 977–991.
- Sapitri, N., & Adiyono, A. (2023). Harmony of Tahsîn. *International Journal of Teaching and Learning*, 1(4), 484–499.
- Saraya, A., Mardhatillah, A., & Fitriani, E. N. (2023). Educational Supervision of The Efforts Made Madrasah Family in Mts Al-Ihsan in Increasing The Professionalism of Teachers Teacher Professionalism. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 17(1), 16–29.
- Saraya, A., Mardhatillah, A., Fitriani, E. N., & Adiyono, A. (2023). The Role of Islamic Religious Education Teachers: Problems in Evaluating Student Learning Outcomes in Junior High Schools. *Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, 4(2), 565–572.
- Siregar, M. S. (2020). Strategi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam dalam Memberdayakan Anak Yatim di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 5(1).
- Sitanggang, A. R., Puteri, A., Nduru, E. B., Fazira, E. M. T., Anggriana, F., Nainggolan, I. B., et al. (2025). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Indonesia: Tantangan, Permasalahan, dan Strategi Peningkatan Mutu. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 3(2), 217–234.
- Suparmin, S., & Adiyono, A. (2023). Implementasi Model Supervisi Distributif dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 143–169.
- Utama, A. H. (2021). Model Desain Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(3).
- Wardhani, N. W., & Andika, M. F. F. (2021). Inclusive Education and Social Justice for All Indonesians. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 619, 135–139.